

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BOOKLET

POTRET INDIKATOR SDGs

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019/2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BOOKLET

POTRET INDIKATOR SDGs

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019/2020

Booklet Potret Indikator SDGs Provinsi Kalimantan Timur 2019/2020

ISBN: 978-623-7693-18-5

No.Publikasi: 64550.2011

Katalog: 4101037.64

Ukuran Buku: 21cm x 14,8cm

Jumlah Halaman: vi+ 28 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Desain cover:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrasi:

<https://www.bps.go.id>

<https://www.pinterest.com>

<https://www.slidescarnival.com/>

<https://www.sdg2030indonesia.org/>

<http://sdgsindonesia.or.id/>

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak oleh:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

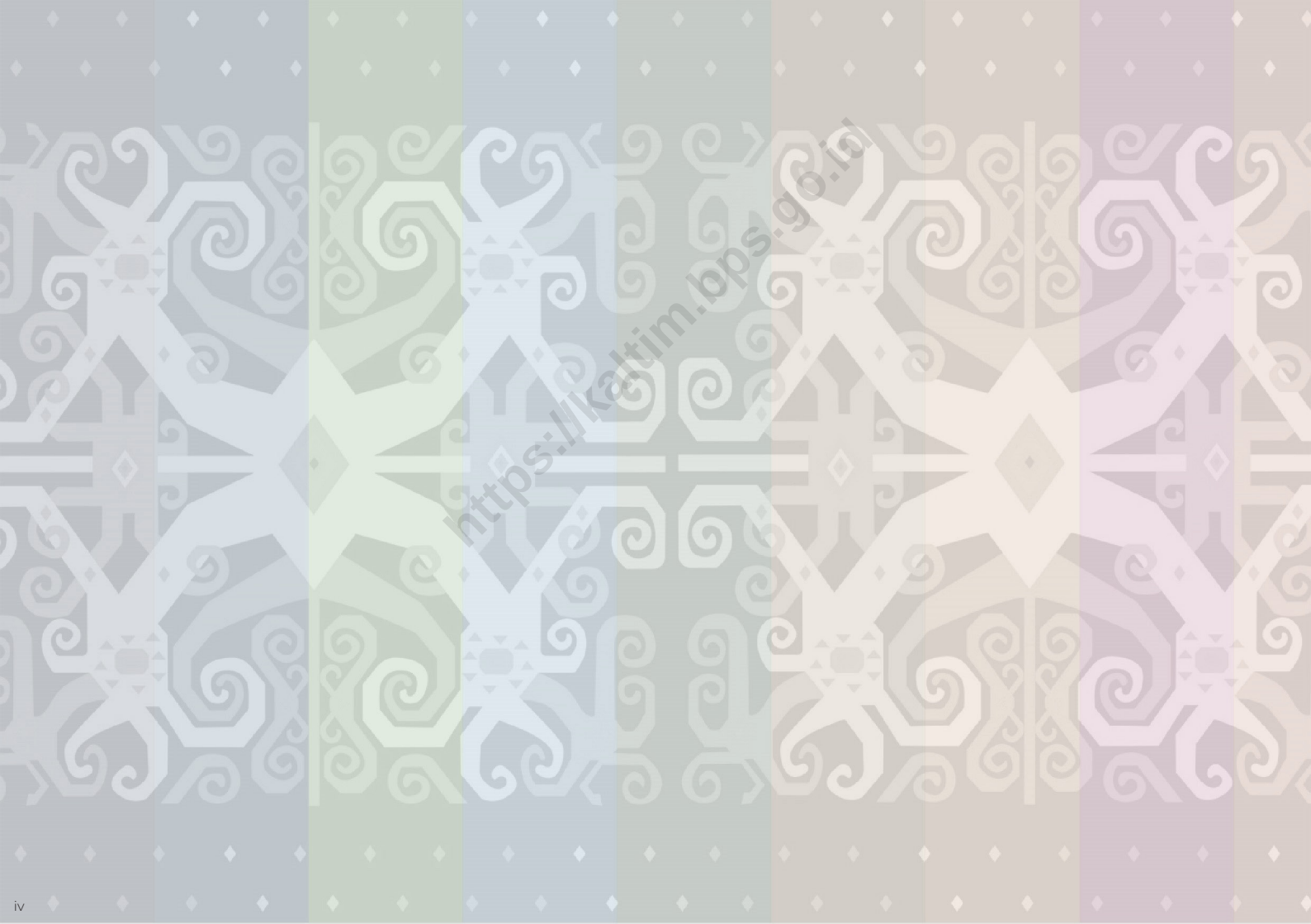
Booklet Potret Indikator SDGs Provinsi Kalimantan Timur 2019/2020 merupakan publikasi yang berisi indikator-indikator pilihan terkait dengan SDGs yang tersedia di BPS Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2020 beserta penjelasan singkatnya. Terdapat beberapa indikator utama yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui berbagai sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi ini dapat terselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Samarinda, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



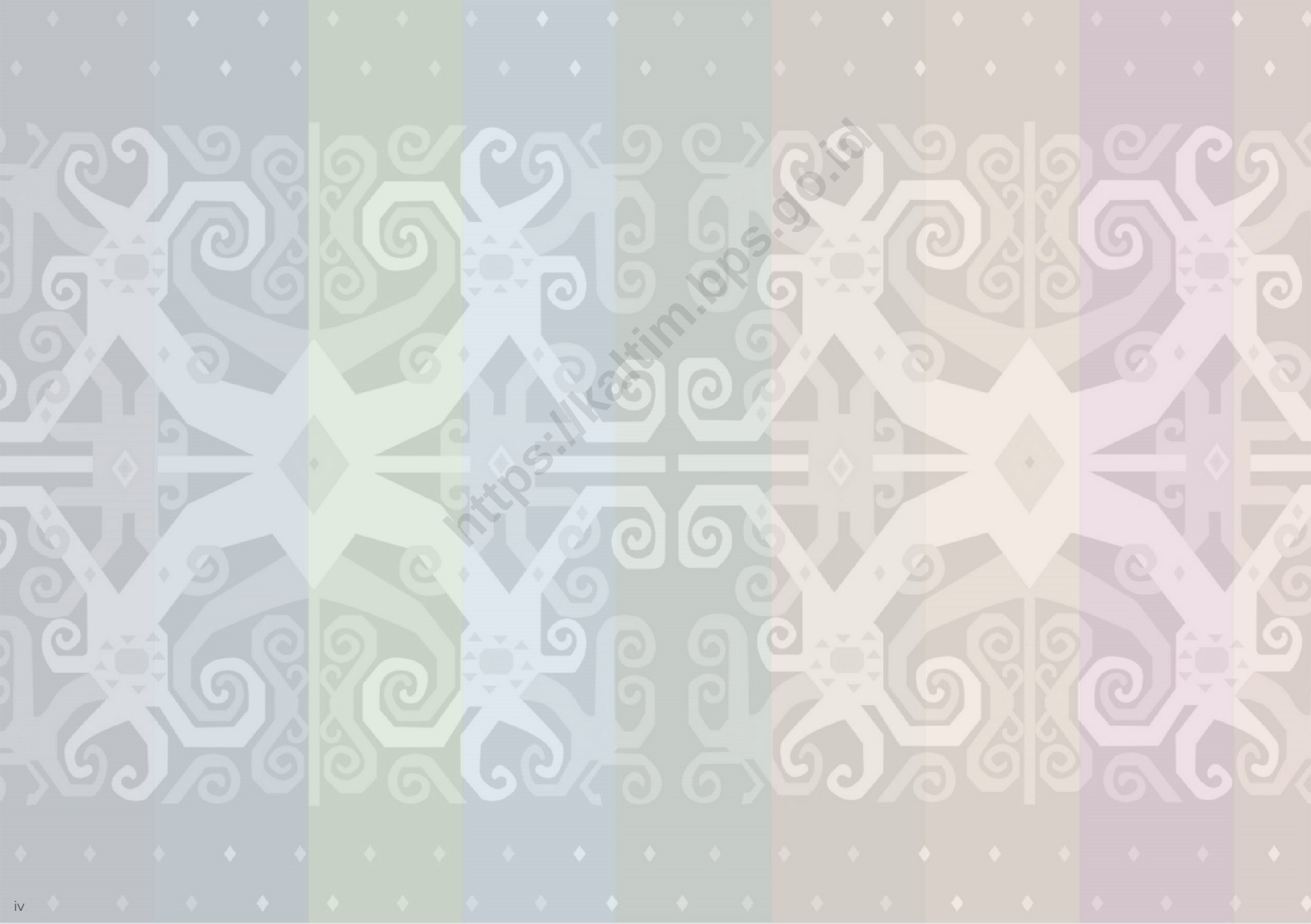
Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si



<https://kaltim.bps.go.id/>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
TENTANG SDGs.....	1
17 TUJUAN SDGs.....	3



<https://kaltim.bps.go.id/>

TENTANG SDGs



Sejak berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia seperti tidak ingin kehilangan momentum dan euforia implementasi SDGs masyarakat dunia.

Di Indonesia, SDGs diterjemahkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB. Banyak hal yang telah Indonesia dalam hal ini pemerintah lakukan dalam rangka membumikan agenda pembangunan global agar lebih Implementif sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, seperti melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder terkait, mengeluarkan perpres mengenai TPB, membakukan metadata TPB, menyusun pedoman teknis terkait Rencana Aksi Nasional (RAN), menyusun Rencana Aksi Nasional, menyusun Peta Jalan (Road Map), dan berbagai kegiatan lainnya.

Sudah sejak 5 tahun terakhir dunia mengadopsi tujuan dan target SDGs kedalam rencana pembangunan Negara masing-masing. Namun berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional, progress yang dilakukan oleh negara-negara dunia belum seperti yang diinginkan. Misalnya, menurut Laporan yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (2018) dan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 2019) menyebutkan bahwa satu juta spesies terancam punah, dan IPBES menambahkan bahwa "kita (manusia) mengikis habis fondasi yang paling dasar dari



ekonomi, mata pencaharian, keamanan pangan, kesehatan, dan kualitas hidup kita di seluruh dunia". Sejalan dengan hal tersebut, sustainable development report (2019) menyebutkan bahwa negara-negara maju dan berpenghasilan tinggi justru berada pada peringkat terburuk pada Tujuan 14 (Kehidupan Di Bawah Air) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat) SDGs.

Kompleksitas SDGs telah membuat banyak pemerintah, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan terkait lainnya bertanya-tanya apakah mengukur kemajuan pencapaian SDGs mungkin dilakukan, sehingga stakeholder SDGs dapat memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan terkait SDGs tersebut. Pemantauan bertujuan untuk memantau kemajuan pencapaian SDGs lintas waktu dan antar daerah; mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan; mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang muncul dan akan muncul, sehingga tinjauan dapat dilakukan sedini

mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian SDGs dan menganalisis masalah dan penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan perencanaan, program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan SDGs mendatang.

Capaian indeks SDGs Indonesia tahun 2019 telah menunjukkan hasil capaian yang cukup baik. Dinamika dalam program atau kegiatan dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah beserta seluruh *stakeholder* merupakan tantangan dalam upaya mencapai tujuan SDGs. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya serta mensinergikan setiap *stakeholder* agar dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang yang pada akhirnya tercapainya tujuan SDGs yang telah ditetapkan.

Capaian indeks SDGs Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 73,2 sekaligus menjadi peringkat 4 di antara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, setelah Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara yang masing-masing menempati peringkat satu sampai tiga secara berurutan. Di balik capaian indeks SDGs Indonesia pada tahun 2019, masih terdapat adanya keberagaman capaian indeks SDGs provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam capaian tujuan SDGs.

17 TUJUAN SDGs

Secara umum, untuk mencapai seluruh tujuan SDGs, selain membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus didukung oleh *political will*, juga memerlukan komitmen yang sangat kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Istilah Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut telah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk kebaikan bersama dan planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang kita kenal sekarang ini merupakan buah karya kerjasama puluhan tahun negara-negara, pakar-pakar, PBB, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kesepakatan dan tujuan bersama.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



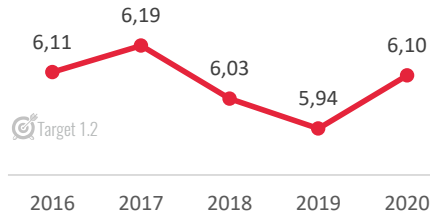
TPB mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020 (persen)

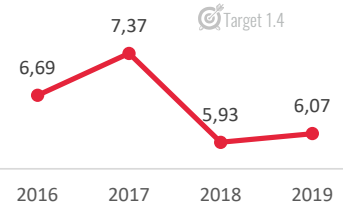


Kemiskinan masih menjadi masalah multidimensi yang dihadapi di semua negara di dunia. Sehingga, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari agenda SDGs. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 6,10 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 5,94 persen. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya perekonomian secara global sehingga berimbas pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur. Namun jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2016 (6,11 persen), angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 persen.

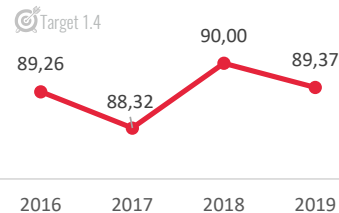
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)

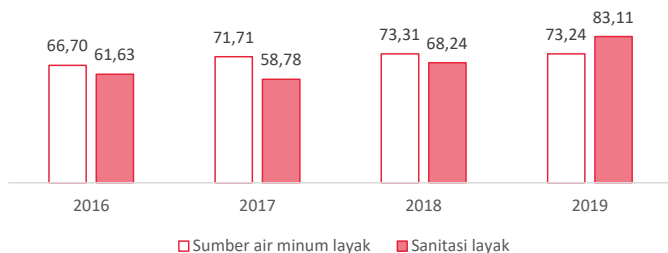


Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan layanan sanitasi layak (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)

Target 1.4

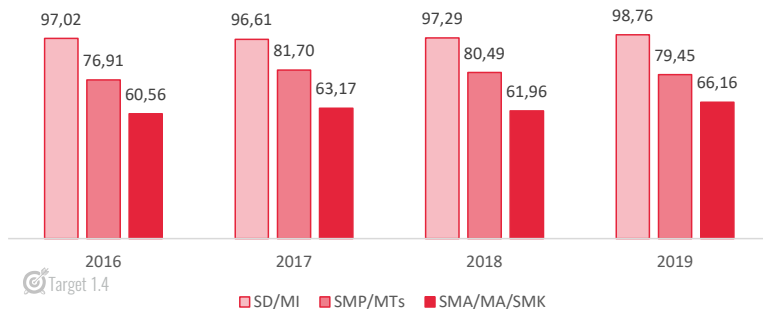


Pada kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terbawah di Provinsi Kalimantan Timur, untuk setiap indikatornya mengalami perubahan yang cenderung membaik pada periode 2016-2019. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun terjadi peningkatan pada persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, dan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD-SMA di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan layanan sanitasi layak mengalami peningkatan yang pesat, masing-masing sebesar 66,70 dan 61,63 persen pada tahun 2016 menjadi masing-masing sebesar 73,24 dan 83,11 persen pada tahun 2019.

Sementara itu, untuk indikator yang apabila angkanya semakin kecil semakin baik, juga mengalami penurunan. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 6,07 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 6,69 persen.



Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan (kelompok penduduk 40% terbawah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019



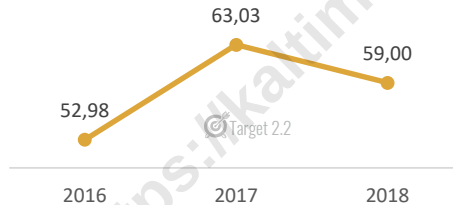


Pada tahun 2030 tujuan 2 mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan menjamin akses yang sama bagi semua orang. Khususnya masyarakat yang dalam kondisi rentan, misalnya masyarakat miskin, termasuk juga bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, manula, dan sebagainya, harus bebas dari kelaparan dan memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan.

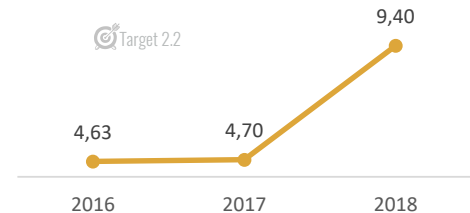
Penduduk Kalimantan Timur yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum untuk makanan (1400 kkal) pada tahun 2018 sebanyak 15,94 persen, turun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 19,16%. Sementara itu, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan di Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama (2016-2018) juga mengalami peningkatan, dari 52,99 persen pada 2016 naik mencapai 59,00 persen pada 2019.

Gizi yang baik tentunya juga harus mempertimbangkan kecukupan kalori beserta nutrisi makro dan mikronya, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Pada periode 2016-2018 juga terjadi peningkatan persentase balita yang mengalami obesitas, dari 4,63 persen (2016) naik mencapai 9,40 persen (2018). Obesitas pada masa kanak-kanak ini jika tidak ditangani dapat berlangsung hingga masa dewasa. Obesitas sendiri diketahui berbahaya bagi kesehatan dan berpengaruh pada kesehatan organ bagian dalam tubuh.

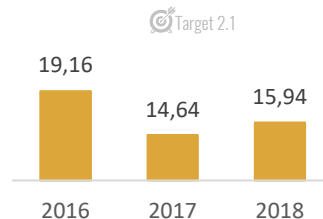
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)



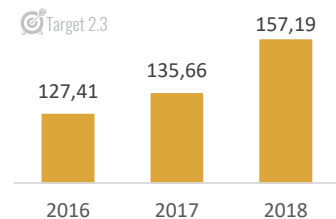
Persentase Balita Obesitas (BB/TB) Kelompok Umur 0-59 bulan di Provinsi Kalimantan Timur,



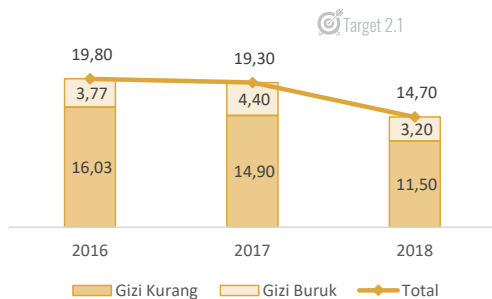
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)



Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (juta rupiah per tenaga kerja) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita menurut tingkat keparahan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)

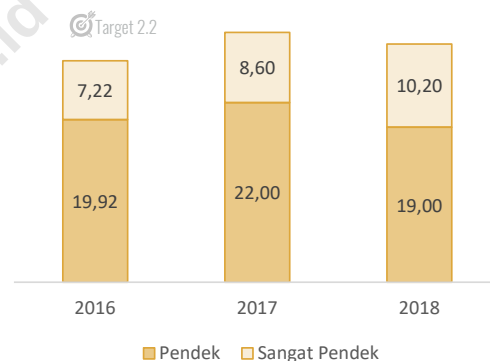


Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita menurut tingkat keparahan, yaitu gizi kurang maupun gizi buruk turut mengalami penurunan pada periode 2016-2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, prevalensi balita yang mengalami kekurangan gizi sebesar 19,90 persen, yang artinya sebanyak 20 dari 100 balita mengalami kekurangan gizi, yang terdiri dari 16 mengalami gizi kurang (16,03 persen) dan 4 sisanya mengalami gizi buruk (3,77 persen). Sementara pada tahun 2018, hanya 15 dari 100 balita (14,70 persen) yang diperkirakan mengalami kekurangan gizi, dimana 12 mengalami gizi kurang (11,50 persen) dan 3 lainnya mengalami gizi buruk (3,20 persen).

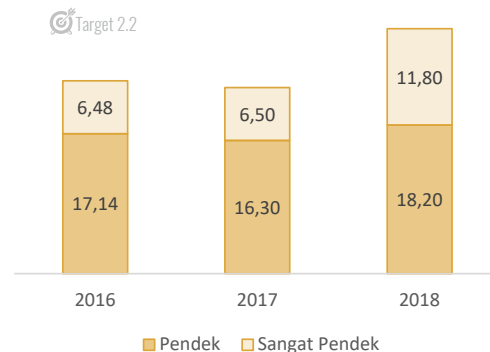
Namun di sisi lain, tingkat prevalensi stunting pada anak balita (usia di bawah 5 tahun) maupun baduta (usia di bawah 5 tahun) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada anak balita, di tahun 2016 prevalensi stunting sebesar 19,92 persen untuk stunting pendek dan 7,22 persen untuk stunting sangat pendek. Pada tahun 2019, prevalensi stunting pendek turun menjadi 19,00 persen, namun prevalensi stunting sangat pendek mengalami kenaikan hingga mencapai 10,20 persen. Sementara itu pada baduta, prevalensi stuntingnya cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan balita. Di tahun 2016, prevalensi stunting pada anak baduta sebesar 19,92 persen untuk stunting pendek dan 7,22 persen untuk stunting sangat pendek. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang mencapai 19,00 persen untuk stunting pendek dan 10,20 untuk stunting sangat pendek. Tingginya angka prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi di masa depan.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Prevalensi stunting pada anak balita menurut tingkat keparahan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)



Prevalensi stunting pada anak baduta menurut tingkat keparahan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)





MENJAMIN KEHIDUPAN
YANG SEHAT DAN
MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN
SELURUH PENDUDUK
SEMUA USIA

Munculnya dinamika penduduk berupa bonus demografi pada tahun 2015 memberikan tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meledaknya jumlah penduduk produktif serta bertambahnya penduduk usia lanjut memunculkan permasalahan beban penyakit ganda. Walaupun angka harapan hidup penduduk mengalami peningkatan, akan tetapi angka kematian akibat penyakit menular masih belum terberantas. Pola penyakit yang diderita oleh penduduk sebagian besar adalah penyakit infeksi menular. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi emerging disease, yaitu suatu penyakit menular baru yang penyebarannya sangat cepat. Munculnya beban penyakit ganda dalam waktu bersamaan mengindikasikan telah terjadi transisi epidemiologi di Indonesia. Pemberantasan penyakit pun perlu dilakukan dengan kerjasama semua elemen masyarakat agar pada 15 tahun mendatang Indonesia dapat menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua.

Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi tantangan yang cukup berat untuk ketercapaian tujuan ini. Pemulihan dan penemuan vaksin untuk virus corona sangat diperlukan untuk dapat mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera ke depannya.

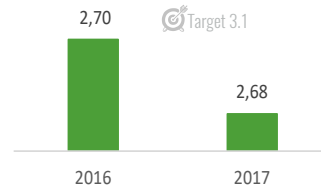
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)

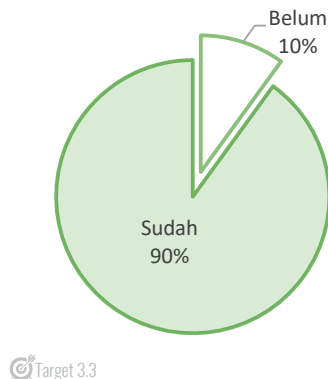


Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat (juta jiwa) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2017

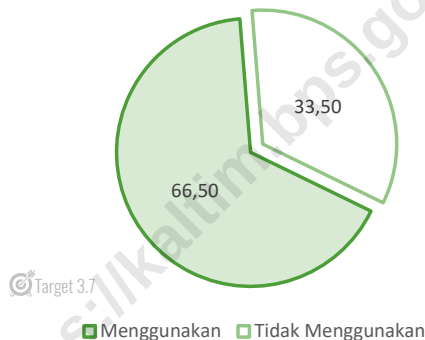


Di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016-2019, proses kelahiran yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan atau ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase/proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih masing-masing mencapai 89,30 persen dan 99,85 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2016 yang masing-masing baru sebesar 87,64 persen dan 89,30 persen. Membbaiknya kedua indikator tersebut menunjukkan semakin mencukupinya jumlah tenaga kesehatan terlatih serta fasilitas kesehatan yang semakin memadai di Provinsi Kalimantan Timur.

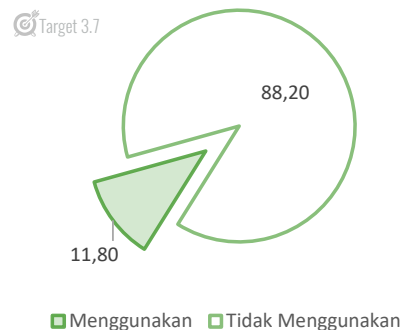
Persentase Kabupaten/Kota yang sudah mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Provinsi Kalimantan Timur, 2018



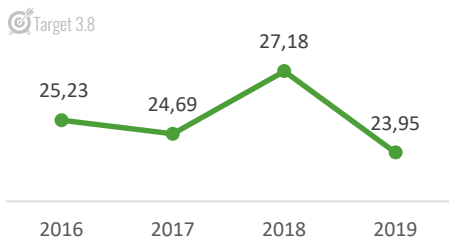
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di Provinsi Kalimantan Timur, 2017



Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). di Provinsi Kalimantan Timur, 2017



Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)



Pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat sekitar 33,50 persen pasangan usia subur (PUS) yang belum menggunakan metode kontrasepsi apapun. Sementara itu di tahun yang sama, hanya 11,80 persen yang sudah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Sementara itu, pada tahun 2018 terdapat 9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impoten), dan sebagainya. Hingga tahun 2019, persentase merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur masih mencapai 23,95 persen atau secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa sekitar 1 dari 4 penduduk Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas merupakan perokok aktif.



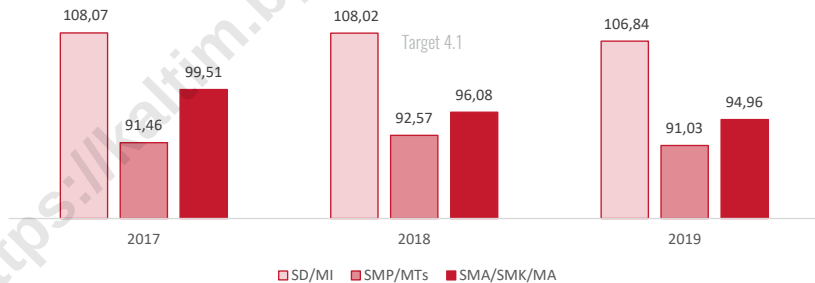
Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa.

Pada tahun 2019, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA di Kalimantan Timur mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2017 dan 2018). Biasanya, semakin tinggi jenjang pendidikan maka cenderung semakin rendah APKnya. Namun anomali justru terjadi di Kalimantan Timur. Pada periode 2017-2019, APK pada jenjang SMP/ sederajat lebih rendah jika dibandingkan dengan APK pada jenjang SMA/ sederajat.

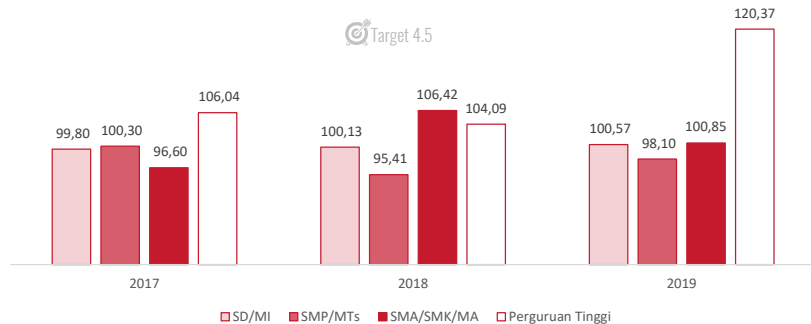
Rasio APK perempuan/laki-laki adalah perbandingan APK siswa perempuan terhadap APK siswa laki-laki pada suatu jenjang pendidikan. Apabila rasio APK semakin mendekati 100, maka semakin berimbang angka APK pada dua kelompok gender di jenjang pendidikan tersebut.

Tujuan 4 dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Pada tujuan ini akan disajikan gambaran pendidikan di Indonesia sesuai dengan indikator dan data terbaru untuk melihat proses yang sedang berjalan hingga saat ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019



Rasio APK Perempuan/Laki-laki menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2018



Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019

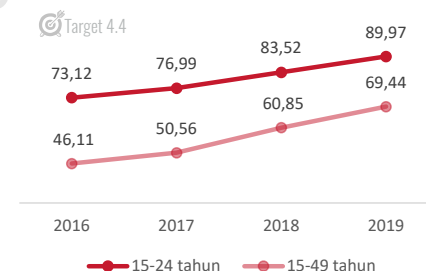


Rata-rata lama sekolah penduduk usia ke atas di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Begitu pula untuk APK Perguruan Tinggi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, APK pendidikan usia dini juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada periode yang sama, proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur juga terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 89,97 persen pada kelompok umur 15-24 tahun dan 69,44 persen pada kelompok umur 15-49 tahun.

Angka melek aksara pada penduduk remaja dan dewasa juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan sejak tahun 2018, angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun sudah mencapai 100%, yang artinya pada kelompok usia tersebut di Kalimantan Timur sudah tidak terdapat lagi orang yang buta huruf. Namun secara keseluruhan, angka melek aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih sebesar 99,03 persen dan mencapai 99,76 persen untuk penduduk usia 15-59 tahun.

Proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



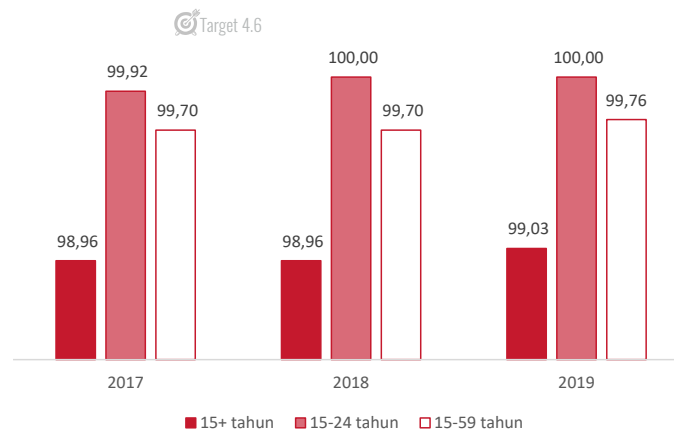
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Persentase angka melek aksara menurut kelompok umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018 (persen)





MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Konsep kesetaraan gender atau dapat disebut sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai makna adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan untuk semua kelompok umur dalam segala bidang kehidupan.

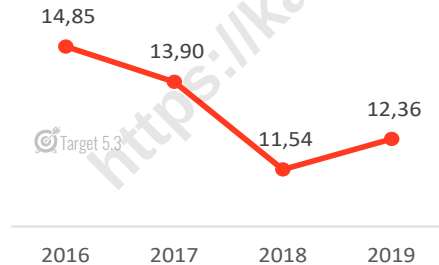
Selama periode 2016-2019, terjadi kecenderungan penurunan proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Kalimantan Timur, dari 14,85 persen di tahun 2016 menjadi 12,36 persen di tahun 2019. Walaupun angka ini lebih rendah lagi pada tahun 2018, yang hanya mencapai 11,54 persen.

Sementara itu, pada periode yang sama terjadi penurunan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/ sederajat, dari 95,38 persen pada tahun 2016 dan mencapai 99,51 persen pada tahun 2017, turun menjadi 96,08 persen di 2018 dan menyentuh 94,96 persen pada 2019.

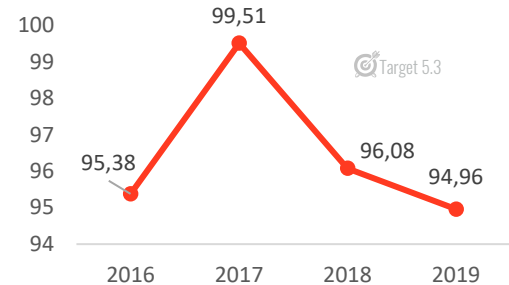
Menurut SDKI 2012 dan 2017, terjadi peningkatan median umur kawin pertama pada perempuan berumur 25-49 tahun yang pernah kawin di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2017, median usia kawin pertama mencapai 21,70 tahun yang berarti, masih ada setengah dari populasi perempuan pada kelompok usia 25-49 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebelum usianya mencapai 21,70 tahun.

Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun merupakan dasar penting bagi dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan 5 memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik.

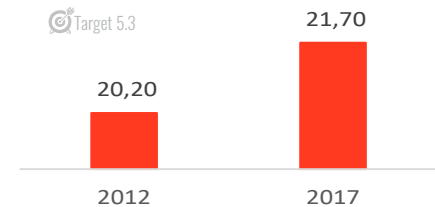
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA dan sederajat di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019

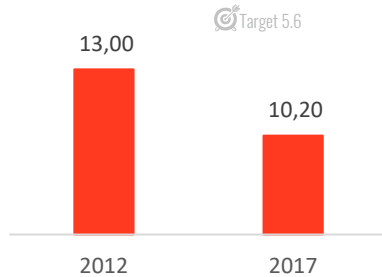


Median Usia Kawin Pertama (tahun) Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 tahun di Provinsi Kalimantan Timur, 2012 dan 2017



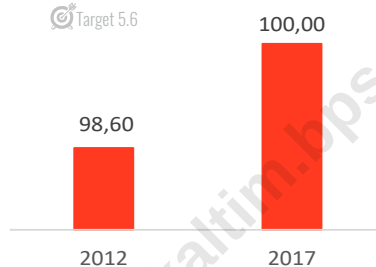
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need KB*) di Provinsi Kalimantan Timur, 2012 dan 2017 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

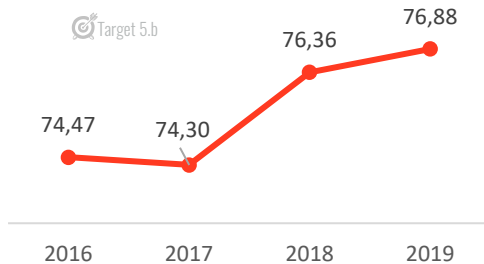
Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern di Provinsi Kalimantan Timur, 2012 dan 2017 (persen)



Berdasarkan data SDKI, pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern di Kalimantan Timur pada tahun 2017 telah mencapai 100 persen, dari yang sebelumnya sebesar 98,60 persen pada tahun 2012.

Sementara itu, kebutuhan keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi di Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2017 (10,20 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2012 (13,00 persen). Artinya, pada tahun 2017 masih ada sekitar 10,20 persen wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan namun tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi. Hal ini terjadi karena beragam alasan, mulai dari takut akan efek samping obat KB, hingga yang malu apabila organ intimnya disentuh oleh tim medis saat pemasangan alat kontrasepsi.

Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



Hingga tahun 2019, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan hingga mencapai 76,88 persen di tahun 2019. Angka ini bisa saja meningkat lebih tinggi lagi di tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan diterapkannya aktivitas sekolah/kuliah yang dilakukan dari jarak jauh maupun *work from home* (WFH) yang diterapkan berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan sebagai langkah untuk menekan laju penyebaran virus corona, sehingga smartphone, laptop, dan sarana komunikasi penunjang lainnya menjadi sangat penting dan tidak dapat terpisahkan lagi dari kehidupan manusia saat ini.

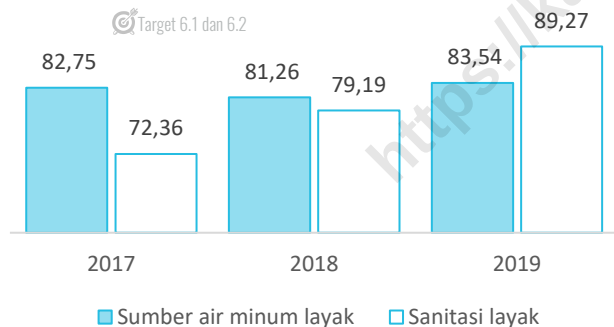


**MENJAMIN
KETERSEDIAAN SERTA
PENGELOLAAN AIR
BERSIH DAN SANITASI
YANG BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA**

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting

dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas Universal Goals dan Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk "Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi" yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air layak dan layanan sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019 (persen)

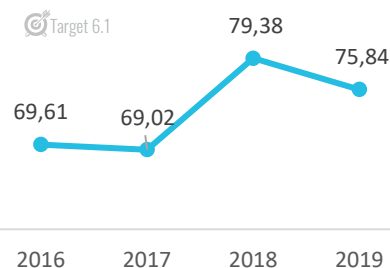


Sumber air layak terdiri dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur dan mata air terlindung, dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci, masak, mandi dan kegiatan lainnya menggunakan sumur bor/pompa, atau sumur/mata air terlindung. Sementara itu, sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plensengan dengan tutup, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Hingga tahun 2019, masih terdapat sekitar 16,46 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses ke layanan sumber air layak dan 10,73 persen rumah tangga yang belum memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak. Di sisi lain, sebanyak 24,16 persen populasi Kalimantan Timur pada tahun 2019 masih belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Terlebih lagi saat ini dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda, sehingga sangat diperlukan sekali kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)





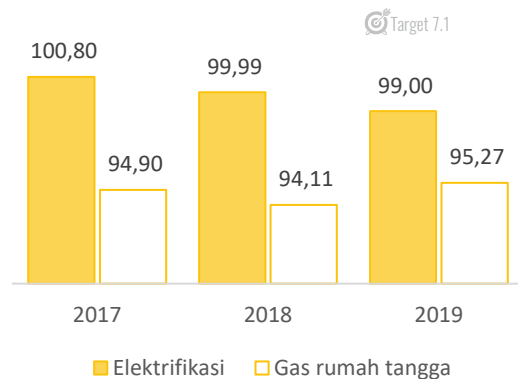
Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Pada periode 2017-2019, rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur mengalami penurunan, dari 100,80 pada tahun 2017 turun menjadi 99,99 pada tahun 2018 dan terus turun hingga 99,00 pada tahun 2019.

Sementara itu pada periode yang sama, rasio penggunaan gas rumah tangga di Kalimantan Timur mengalami peningkatan, dari 94,90 di tahun 2017, naik menjadi 94,11 di tahun 2018 dan mencapai 95,27 di tahun 2019. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Bahkan melalui Perpres No.6 tahun 2019, pemerintah telah mendeklarasikan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga.



Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Namun hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terealisasi. Melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung zero net energy sudah bisa dibangun. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Tentunya selain efisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi, perlu juga memastikan bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Rasio elektrifikasi dan penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan Indonesia sebagai Middle-Upper Country oleh Bank Dunia pada Juli 2020 merupakan hasil dari semakin meningkatnya PDB per kapita hingga tahun 2019.

Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, PDRB per kapita pada periode 2017-2019 terus mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu 2,72 persen. Pada tahun tersebut, PDRB per kapita Kalimantan Timur mencapai 175,65 juta rupiah atas dasar harga berlaku (ADHB) dan 130,86 juta rupiah atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Namun di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan pada tahun 2018 (turun 2,26 persen) dan tahun 2019 (turun 0,55 persen). Ini mengindikasikan terjadinya penurunan produktivitas tenaga kerja di Kalimantan Timur pada kurun waktu tersebut.

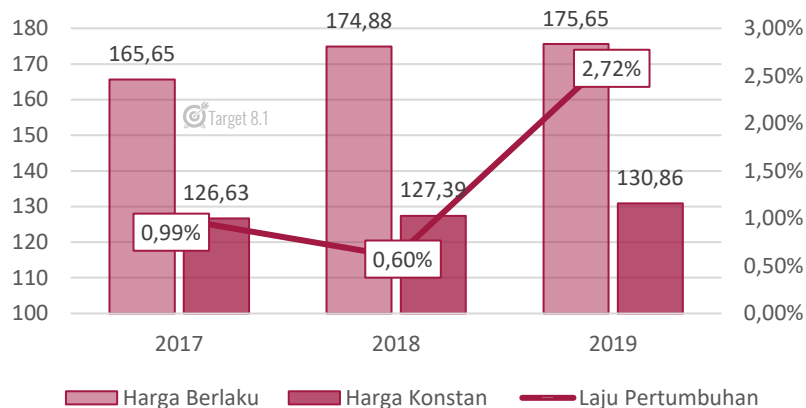
Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun (persen) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (inclusive growth) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (green growth). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

PDRB per kapita per tahun (juta rupiah) dan laju pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019

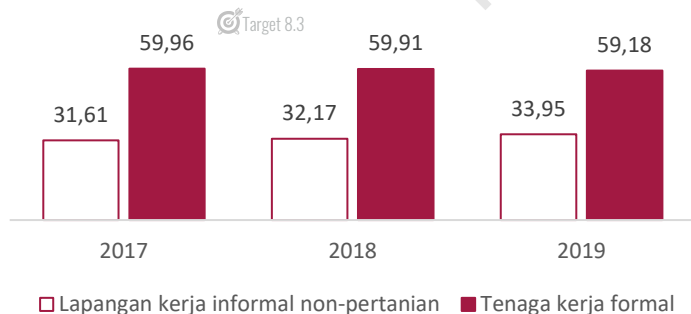


Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kalimantan Timur, proporsi lapangan kerja sektor informal mengalami peningkatan, sementara persentase tenaga kerja formal terus mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan dan masih mendominasi dengan proporsi lebih dari setengah (59,18 persen pada tahun 2019) total tenaga kerja yang ada. Pekerjaan informal sangat rentan terhadap gejala perekonomian, sehingga diperlukan regulasi untuk menjamin hak para pekerja informal agar menjamin kesempatan kerja yang layak.

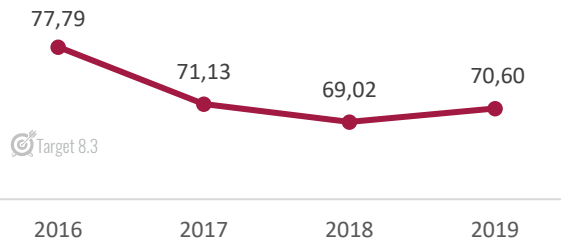
Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di daerah pedesaan. Sebagian besar pekerja dari sektor pertanian merupakan pekerja informal. Pada tahun 2019, sekitar 70,60 persen dari total pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja informal. Angka ini cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 77,79 persen dari total pekerja di sektor pertanian.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2016-2019), upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi naik turun, meskipun secara keseluruhan, upah rata-rata per jam pekerja di tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016, mencapai 21,58 ribu rupiah per jam dari yang sebelumnya sebesar 20,18 ribu rupiah per jam.

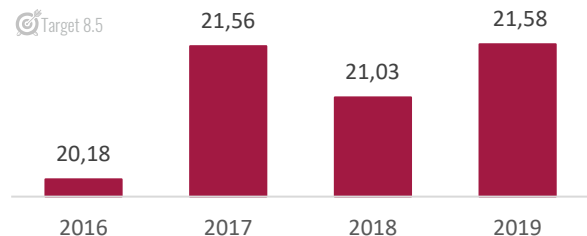
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian dan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019 (persen)



Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



Upah rata-rata per jam pekerja (ribu rupiah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019



Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran (persen) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020



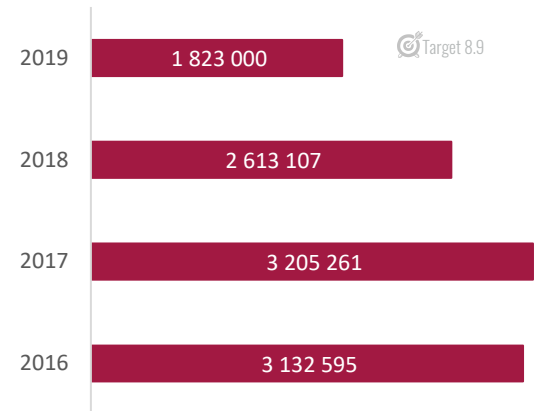
Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020, termasuk di Kalimantan Timur. Setelah pada periode 2016-2019 angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 angka tersebut naik dari 6,09 persen pada tahun 2019 menjadi 6,87 persen pada tahun 2020. Senentara itu, tingkat setenga pengangguran juga mengalami lonjakan tajam pada tahun 2020, dari yang sebelumnya sebesar 4,82 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 7,14 persen di tahun 2020. Angka ini bahkan melebihi angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun tersebut.

Data jumlah perjalanan menurut provinsi asal Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencatat sebanyak 1,82 juta perjalanan, mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 2,61 juta perjalanan. Hal ini diindikasikan sebagai dampak dari meningkatnya harga tiket pada tahun tersebut.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



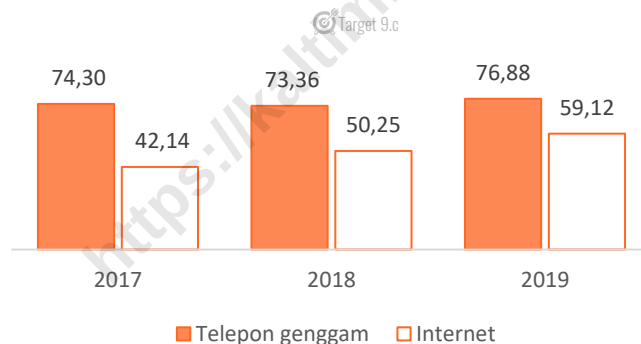
Jumlah perjalanan menurut provinsi asal yang dilakukan oleh penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019





Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

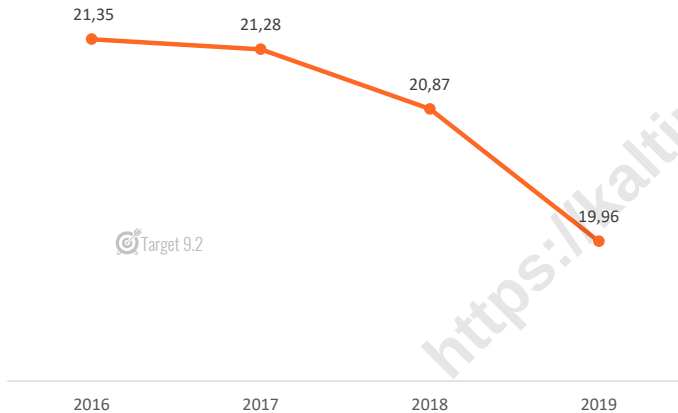
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dan proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019 (persen)



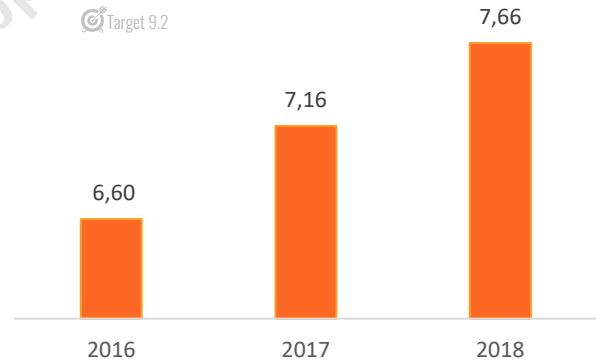
Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Penggunaan internet di sini termasuk dalam hal mengakses media sosial, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan lain-lain.

Secara umum, proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon selular serta proporsi penduduk yang menggunakan internet di Kalimantan Timur pada periode 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, sudah sebanyak 76,88 persen dari total penduduk Kalimantan Timur yang menguasai/memiliki telepon genggam jenis apapun. Sementara itu, pada tahun yang sama sebanyak 59,12 persen penduduk sudah menggunakan koneksi internet.

Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (persen) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016-2019 menunjukkan tren yang terus mengalami penurunan. Ini berarti, output dari industri pengolahan non migas masih belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian Kalimantan Timur.

Namun di sisi lain, Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kalimantan Timur pada periode 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 7,66 persen, naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Hingga tahun 2020, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu mega proyek yang sedang berlangsung adalah proyek pembangunan jalan tol Balsam (Balikpapan-Samarinda) yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian ruas Samboja-Manggar dan pembangunan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara, sehingga nantinya tidak perlu lagi menggunakan kapal feri maupun kapal *klotok* untuk melakukan penyeberangan antara dua daerah tersebut.

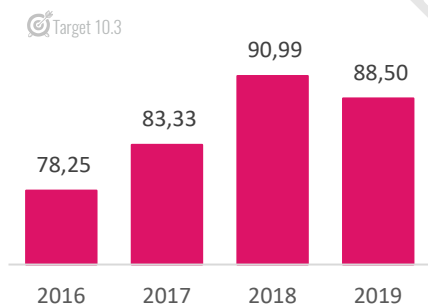


MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

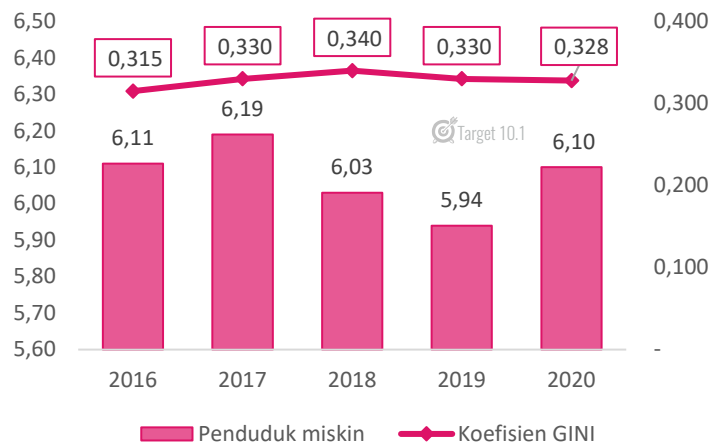
Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah di mana kebutuhannya paling besar. Memfasilitasi migrasi yang aman dan mobilitas orang juga menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan yang melebar. Tujuan 10 juga membahas masalah-masalah

Kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Pada periode 2016-2020 di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terjadi peningkatan koefisien GINI yang mengindikasikan meningkatnya kesenjangan pendapatan yang terjadi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada periode yang sama cenderung mengalami penurunan, namun pada 2020 angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, naik menjadi 6,10 persen dari sebelumnya 5,94 persen. Namun angka ini masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 yang masing-masing sebesar 6,11 dan 6,19 persen. Indeks kebebasan sipil pada tahun 2019 dikategorikan sebagai "baik", yang ditandai dengan nilai indeks yang lebih besar dari 80.

Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019

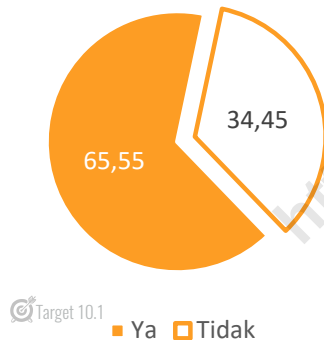


Koefisien GINI dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020



Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Kalimantan Timur, 2019 (persen)



Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 1 dari 3 rumah tangga di Kalimantan Timur yang masih belum memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hunian layak huni didefinisikan sebagai rumah/hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).



*MENJAMIN POLA
PRODUKSI DAN
KONSUMSI YANG
BERKELANJUTAN*

Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Diharapkan pula pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat memberikan multimanfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggungjawab, efisien dan ramah lingkungan.



*MENGAMBIL
TINDAKAN CEPAT
UNTUK MENGATASI
PERUBAHAN IKLIM
DAN DAMPAKNYA*

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terkena bencana-bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim berdampak terhadap banyak sektor, maka dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan koordinasi yang baik antar sektor. Dengan kondisi sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belumlah sebaik negara-negara maju. Dikhawatirkan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah bisa terhambat karena dampak perubahan iklim tersebut. Untuk itu pada tujuan ini diharapkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang terjadi dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional dan meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.



*MELESTARIKAN
DAN MEMANFAATKAN
SECARA BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN SAMUDERA
UNTUK PEMBANGUNAN
YANG BERKELANJUTAN*

Samudera dunia—suhu, unsur kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya—adalah penggerak sistem global yang membuat Bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara kita mengelola sumber daya vital ini sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, dan untuk mengimbangi dampak dari perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Tetapi saat ini kita melihat bahwa 30 persen simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan. Samudera juga menyerap sekitar 30 persen karbon dioksida yang dihasilkan manusia, dan kita melihat kenaikan pengasaman samudera hingga 26 persen sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang mayoritas bersumber dari darat telah mencapai level yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. SDG menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera kita.



MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kehidupan manusia bergantung pada tanah sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Tumbuhan menyediakan 80 persen bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30 persen permukaan bumi, dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Belum pernah kita melihat penurunan kualitas tanah seperti saat ini, dan hilangnya tanah yang bisa

ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar dan memengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 hewan yang diketahui, 8 persen telah punah dan 22 persen berada di ambang kepunahan. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan dan gunung pada 2020. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama.

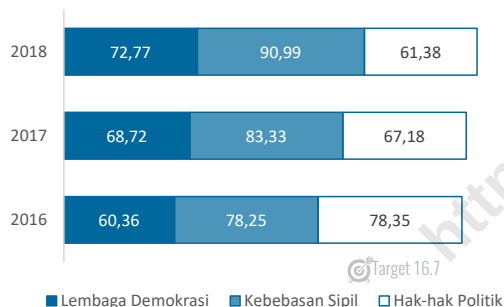




MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF
DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES
KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN
KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL,
DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan negara. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

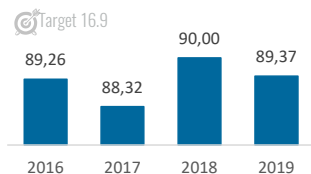
Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil,
dan Indeks Hak-hak Politik di Provinsi Kalimantan
Timur, 2016-2018



Indeks Lembaga Demokrasi dan Indeks Kebebasan Sipil di Kalimantan Timur pada periode 2016-2018 terus mengalami peningkatan dan berada pada kategori "tinggi", meskipun untuk Indeks Hak-hak Politik terus mengalami penurunan. Turunnya indeks ini menunjukkan berkurangnya hak-hak politik warga negara baik dalam hal memilih/dipilih maupun berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif. Meski demikian, capaian indeks hak-hak politik masih berada pada kategori "sedang". Sementara itu, persentase anak yang memiliki akta kelahiran maupun yang tercatat oleh lembaga pencatatan sipil di Kalimantan Timur pada periode 2017-2019 berada pada kisaran 90 persen ke atas.

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran dan proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019

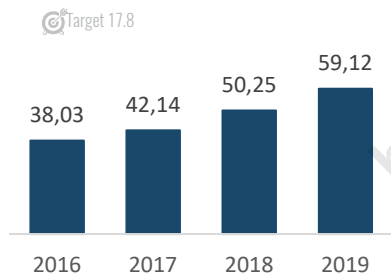
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (penduduk 40%
pendapatan terendah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019





Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat pada kemitraan dan kerja sama di tingkat global. Pemenuhan target-target pembangunan harus dilakukan dengan meningkatkan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, PBB, dan pemeran aktor global lainnya. Kemitraan ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara tertinggal. Pengembangan ini dilakukan salah satunya dengan mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang meningkatkan ekspor.

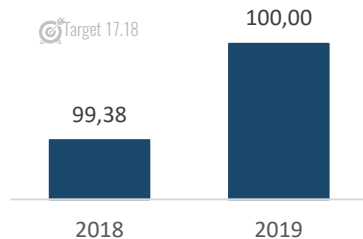
Proporsi individu yang menggunakan internet di
Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2019 (persen)



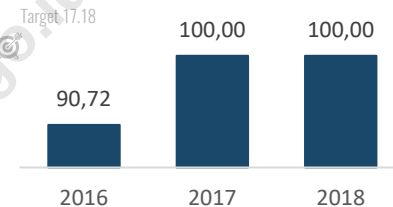
Proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 59,12 persen pada tahun 2019, yang berarti pada tahun tersebut, lebih dari separuh individu di Kalimantan Timur sudah menggunakan internet.



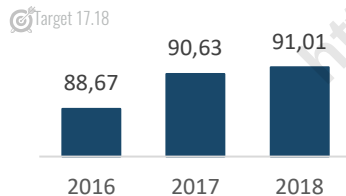
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik di Kalimantan Timur yang merasa puas dengan kualitas data statistik (persen), 2018-2019



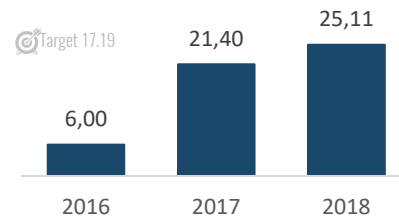
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2018



Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Timur sebagai rujukan utama (persen), 2016-2018



Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (persen), 2016-2018



Persentase kepuasan konsumen Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen. Begitu pula dengan konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik di Kalimantan Timur yang juga mencapai 100 persen sejak tahun 2017. Sementara itu, persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur sebagai rujukan utama mencapai 91,01 persen pada tahun 2018, dan persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (maupun daerah) baru mencapai 25,11 di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena beberapa data yang dibutuhkan oleh *stakeholder* bisa saja tidak tersedia di BPS, dan tersedia di kementerian atau instansi pemerintahan lainnya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kemakmuran No. 04, Samarinda 75117

Telp.: 0541 732793 E-mail: bps6400@bps.go.id

Homepage: <https://kaltim.bps.go.id>

ISBN 978-623-7693-18-5

